

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting setelah sebuah kebijakan ditetapkan, karena pada tahap inilah kebijakan benar-benar dijalankan dan diuji efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat. Tanpa implementasi yang baik, kebijakan hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak memberikan dampak nyata. George C. Edwards III¹ menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel utama yang saling berkaitan. Keempat variabel tersebut adalah :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi Atau Sikap Pelaksana
4. Struktur Birokrasi.

Teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III relevan digunakan untuk menganalisis problematika dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan Car Free Day Taman Kota Baturaja. Penelitian ini memandang bahwa keberhasilan atau kegagalan kebijakan penertiban PKL tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh faktor-faktor yang memengaruhi jalannya implementasi.

¹ George C. Edwards III, **Implementing Public Policy** (Washington D.C: Congressional Quarterly Press, 1980).

a. Komunikasi

Kebijakan akan berjalan efektif apabila pesan kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana. Informasi yang disampaikan harus konsisten, serta sampai kepada pihak yang tepat. Komunikasi yang buruk akan menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan apabila pelaksana tidak memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas personel. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga memegang peranan penting, karena tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksana akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas. Sarana dapat berupa perlengkapan penunjang, teknologi, maupun tempat khusus yang disediakan untuk mendukung jalannya kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya manusia, kelengkapan sarana-prasarana, serta kejelasan kewenangan yang dimiliki pelaksana.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh sikap, komitmen, dan motivasi dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap mendukung kebijakan, maka implementasi akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, apabila

terdapat resistensi atau kurangnya komitmen, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi yang terlalu panjang dan rumit sering kali menjadi penghambat implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta prosedur kerja yang sederhana akan memudahkan pelaksanaan kebijakan. *Standard Operating Procedures* (SOP) juga menjadi faktor penting untuk menjamin konsistensi pelaksanaan di lapangan.

2.2 Tata Kelola Pemerintahan

Konsep tata kelola pemerintahan pada dasarnya menekankan pentingnya hubungan antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya bersama. Tata kelola pemerintahan sering diartikan sebagai suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu pola hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan berbagai urusan publik yang didasarkan pada prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, melainkan pada pelayanan publik serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.²

² Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 52.

Sementara itu, Sedarmayanti³ menjelaskan bahwa *good governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan adanya tiga prinsip utama, yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipasi Masyarakat.

2.2.1 Transparansi

Pemerintah wajib terbuka dalam memberikan informasi terkait kebijakan publik. kebijakan penertiban membutuhkan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat. Satpol PP telah melakukan sosialisasi melalui himbauan dan surat edaran, namun tantangan muncul karena tidak semua pedagang memahami secara utuh isi kebijakan tersebut. Situasi ini bukan semata persoalan kurangnya upaya dari aparat, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi pedagang yang lebih fokus pada peluang berdagang di lokasi ramai pengunjung.

2.2.2 Akuntabilitas

Mengandung arti bahwa pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada masyarakat. penertiban yang dilakukan Satpol PP

³ Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 3.

merupakan bagian dari pelaksanaan tugas sesuai peraturan daerah. Upaya tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat pengguna ruang publik. Meski demikian, akuntabilitas juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat luas dan kebutuhan ekonomi pedagang, sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesan merugikan salah satu pihak.

2.2.3 Partisipasi masyarakat

Masyarakat dilibatkan dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. tata kelola pemerintahan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam kebijakan publik. Dalam konteks penertiban PKL, peluang pelibatan dapat dilakukan melalui dialog, musyawarah, atau forum komunikasi antara pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

2.3 Ketertiban Umum dan Manajemen Ruang Publik

Ketertiban umum pada dasarnya berkaitan dengan kondisi masyarakat yang tertata, aman, dan sesuai dengan norma hukum maupun sosial. Menurut Ridwan HR, ketertiban umum adalah keadaan dimana masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tertib, tenang, dan nyaman tanpa adanya gangguan dari pihak lain⁴. Ketertiban umum menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan

⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 215.

pemerintahan, khususnya bagi aparat penegak perda seperti Satuan Polisi Pamong Praja.

Soerjono Soekanto⁵ menjelaskan bahwa ketertiban merupakan salah satu indikator terciptanya keteraturan sosial, yaitu suatu keadaan ketika interaksi sosial berjalan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Dengan kata lain, ketertiban umum adalah manifestasi dari hukum dan norma sosial yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ruang publik merupakan ruang yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Ruang publik adalah wadah bagi warga negara untuk berkumpul, berinteraksi, dan membentuk opini bersama dalam kehidupan sosial⁶. Dalam konteks perkotaan, ruang publik tidak hanya berarti tempat diskusi, tetapi juga taman kota, trotoar, dan jalan yang digunakan untuk aktivitas masyarakat.

Menurut Shirvani, manajemen ruang publik merupakan proses pengelolaan ruang kota agar dapat digunakan secara optimal bagi masyarakat.⁷ Pengelolaan ini mencakup pengaturan fungsi, tata letak, kenyamanan, dan aksesibilitas, sehingga ruang publik benar-benar dapat melayani kepentingan masyarakat luas.

Eko Budiharjo menekankan bahwa manajemen ruang publik harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, ekonomi, dan estetika.⁸ Apabila ruang publik hanya dipenuhi oleh kepentingan ekonomi seperti aktivitas

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 145.

⁶ Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 88–90.

⁷ Trancik, Roger. 2013. *Finding Lost Space: Teori Perancangan Kota*. Jakarta: Erlangga.

⁸Eko Budiharjo, **Tata Ruang Perkotaan** (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 67.

pedagang kaki lima, maka fungsi sosial dan estetika berpotensi hilang. Sebaliknya, jika ruang publik hanya diorientasikan pada aspek estetika tanpa memperhatikan aspek ekonomi masyarakat kecil, maka akan memunculkan ketidakadilan sosial.

2.4 Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati OKU melalui Sekretaris Daerah. Fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah di wilayah Kabupaten OKU.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 5 Ayat (b), (c), dan (d) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu⁹, Satpol PP memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi gangguan sosial.

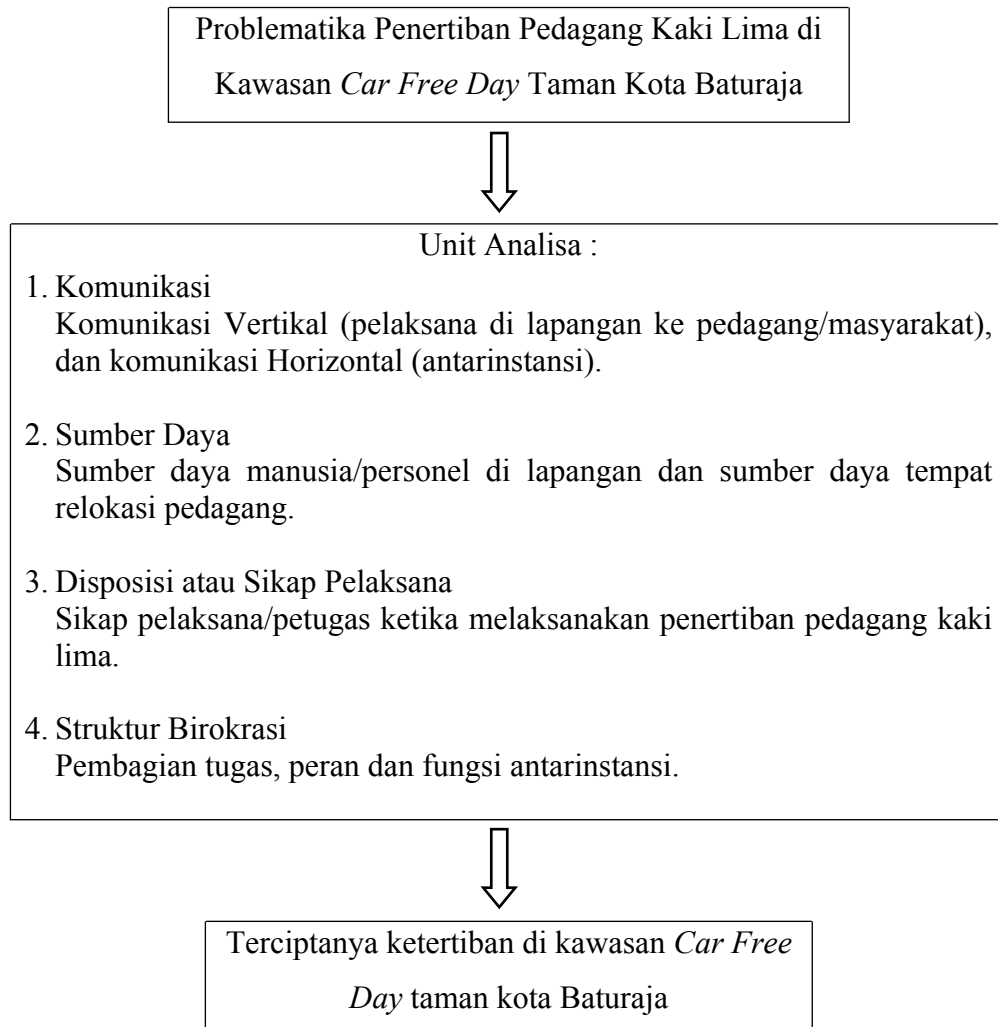
⁹ Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.2013. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Baturaja : Pemkab OKU

Satpol PP Kabupaten OKU tidak hanya menjalankan penertiban melalui tindakan langsung, tetapi juga melakukan pendekatan persuasif kepada warga, khususnya pedagang kaki lima yang menempati ruang-ruang publik tanpa izin.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah susunan alur logika yang menjelaskan hubungan antara masalah yang diteliti, teori yang digunakan, serta arah pemecahan masalah melalui penelitian. Dengan kata lain, kerangka berpikir membantu peneliti dan pembaca memahami jalannya pemikiran dari awal masalah sampai ke tujuan penelitian. Berikut adalah kerangka pikir yang saya gunakan :

Kerangka berpikir ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, tetapi juga sebagai konsep yang menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan dan bagaimana langkah-langkah penelitian diarahkan. Dengan demikian, kerangka berpikir dapat memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai hubungan antara konsep, variabel, dan permasalahan yang diteliti. Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pemikiran peneliti, yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk bagan berikut:



Bagan 2.1
Kerangka pikir